

Informasi bulanan

Agustus 2024

**solvetax**

solutions for your tax

**Konsultasi pajak SolveTax  
StB Dipl.-Bw.(FH) Sascha Schneider  
Konsultan spesialis untuk hukum pajak  
internasional**

Schwindstrasse 2  
63739 Aschaffenburg

Telepon: +49 151 28960404  
E-mail: mail@solvetax.de

Selamat datang kembali di dunia pajak dan keuangan Jerman,

Pengadilan Fiskal Federal memutuskan bahwa pembatasan saling hapus kerugian untuk transaksi forward dan pendapatan modal tidak konstitusional. Peraturan ini merupakan perlakuan ganda yang tidak setara terhadap wajib pajak, yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan menurut Undang-Undang Dasar Jerman.

Pengadilan Pajak Lower Saxony memutuskan berlawanan dengan pendapat otoritas pajak, yang menyatakan bahwa biaya untuk acara perpisahan karyawan harus diperlakukan sebagai upah jika melebihi batas pengecualian EUR 110 per peserta.

Pengadilan Fiskal Federal baru-baru ini mengklarifikasi apakah tarif pajak tetap sebesar 25% dapat diterapkan pada acara-acara yang bersifat sosial tetapi tidak terbuka untuk semua karyawan perusahaan.

Menteri Keuangan Federal telah mengumumkannya, tetapi Undang-Undang Pajak Tahunan Kedua 2024 mengejutkan. Undang-undang ini bermaksud untuk mengatasi banyak tantangan yang belum dapat diatasi dengan langkah-langkah dalam Undang-Undang Pajak Tahunan 2024.

Apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau topik lainnya? Silakan hubungi kami.

Kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda.

Tim SolveTax Anda

## Untuk pembayar pajak penghasilan

---

### **Pembatasan penggantian kerugian untuk transaksi forward dan pendapatan modal tidak sesuai dengan konstitusi**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, kerugian dari transaksi forward hanya dapat dikompensasikan hingga batas EUR 20.000 per tahun (Pasal 20 (6) ayat 5 EStG). Selain itu, kerugian dari pendapatan modal (misalnya dari saham) hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan dari pendapatan modal. Oleh karena itu, penggantian kerugian terhadap pendapatan lain tidak diperbolehkan. Namun, menurut pendapat Pengadilan Fiskal Federal, hal ini tidak dapat dibenarkan dan menempatkan investor yang sangat aktif pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini merupakan perlakuan yang tidak setara dan perpajakan asimetris, yang melanggar prinsip neto obyektif dan oleh karena itu membuat pembatasan saling hapus kerugian untuk transaksi forward dan pendapatan modal tidak konstitusional (kasus no. VIII B 113/23).

Pengadilan Fiskal Federal telah memutuskan konstitusionalitas dari pembatasan penggantian kerugian atas kerugian pelepasan saham dalam keputusannya tertanggal 17.11.2020 (kasus no. VIII R 11/18). Pengadilan Fiskal Federal juga menganggap ketentuan ini tidak konstitusional karena melanggar Pasal 3 Undang-Undang Dasar Jerman dan merujuk masalah ini ke Mahkamah Konstitusi Federal (Federal Constitutional Court, sedang menunggu keputusan dengan perkara no. 2 BvL 3/21).

### **Biaya "layanan cuci" bukan layanan yang berhubungan dengan rumah tangga**

Dalam kasus sengketa tersebut, para penggugat memperoleh penghasilan antara lain dari pekerjaan. Mereka tinggal di sebuah rumah terpisah. Terdapat ruang kerja di lantai satu untuk penggugat dan ruang kerja lainnya di lantai atas untuk penggugat. Penggugat bekerja selama 5 hari dalam seminggu dan menggunakan kantor yang disediakan oleh majikannya bersama dengan seorang rekan kerja. Selain itu, penggugat menggunakan layanan yang disebut layanan binatu di luar rumah tangga mereka sendiri dan mengklaimnya sebagai layanan yang berhubungan dengan rumah tangga. Mereka juga menyatakan biaya staf untuk pesta ulang tahun pribadi sebagai layanan rumah tangga. Sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam hal ini, penggugat

mengambil bagian dalam sebuah seminar karena kurangnya pengetahuannya seputar proses hukum terhadap kantor pajak. Dia mengklaim biaya (pelatihan) ini sebagai biaya yang berhubungan dengan pendapatan.

Pengadilan Fiskal Münster memutuskan bahwa biaya untuk kantor di rumah tidak dapat dianggap sebagai biaya yang berhubungan dengan penghasilan jika kantor bisnis juga tersedia, bahkan jika wajib pajak menggunakan kantor di rumah untuk tujuan profesional pada hari pensiun dan hari non-kerja lainnya. Berlawanan dengan pendapat penggugat, biaya seminar bukan merupakan biaya pelatihan untuk pendapatan penggugat dari pekerjaan. Namun, seperti halnya biaya pengadilan dan biaya pemeriksaan berkas di pengadilan pajak, biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan secara pro rata sebagai biaya hukum untuk pendapatan penggugat dari pekerjaan. Menurut pendapat para hakim, penggunaan "layanan binatu" (mencuci, menyetrrika, menganji, menyetrrika), yang layanannya disediakan di luar rumah tangga, bukanlah layanan yang berhubungan dengan rumah tangga. Biaya untuk penggunaan petugas layanan di ruang pesta yang terletak di luar rumah penggugat juga tidak dapat diperhitungkan sebagai layanan yang berhubungan dengan rumah tangga (kasus no. 12 K 1090/21 E).

## **Pengeluaran untuk perayaan pada saat perpisahan karyawan dapat menjadi kepentingan bisnis utama pemberi kerja**

Dalam sengketa ini, Pengadilan Fiskal Lower Saxony memutuskan bahwa penggugat - sebuah lembaga keuangan - secara keliru dianggap bertanggung jawab atas pajak penghasilan atas pengeluaran untuk sebuah acara untuk menandai perpisahan CEO sebelumnya. Acara tersebut berlangsung di tempat penggugat dan diselenggarakan serta dibiayai oleh penggugat, yang juga memperkenalkan CEO yang baru. Auditor pajak upah eksternal tidak mengakui acara tersebut sebagai acara perusahaan dan mengaitkan biaya tersebut dengan CEO sebelumnya sebagai upah, karena tidak semua karyawan diundang dan biaya tersebut melebihi batas pengecualian EUR 110 per peserta. Namun, pengadilan menemukan bahwa acara tersebut merupakan perayaan penggugat, karena daftar tamu sebagian besar dibuat berdasarkan pertimbangan bisnis dan penggugat bertindak sebagai tuan rumah. Hanya sejumlah kecil tamu pribadi dari CEO sebelumnya yang hadir. Menurut pendapat pengadilan, resepsi tersebut merupakan kepentingan

bisnis penggugat yang utama, karena selain perpisahan CEO sebelumnya, pengenalan penggantinya juga dilakukan.

Dengan mempertimbangkan semua situasi, resepsi tersebut merupakan acara perusahaan dan hanya biaya yang dikeluarkan oleh CEO sebelumnya dan anggota keluarganya yang dianggap sebagai upah (Ref. 8 K 66/22).

### Catatan

Pendapat administratif, yang menyatakan bahwa biaya untuk pesta perpisahan untuk karyawan harus diperlakukan sebagai upah secara total jika melebihi batas pengecualian EUR 110, sementara dalam kasus pesta ulang tahun hanya biaya yang dikeluarkan oleh karyawan dan tamunya yang dianggap sebagai upah, ditolak oleh pengadilan karena tidak tepat.

## Pajak tarif tetap untuk acara yang tidak terbuka untuk semua karyawan

Pengadilan Fiskal Federal (Bundesfinanzhof, BFH) telah mengklarifikasi (kasus no. VI R 5/22) apakah tarif pajak tarif tetap sebesar 25% dapat diterapkan pada acara-acara yang bersifat sosial namun tidak terbuka untuk semua karyawan perusahaan (dalam hal ini: pesta Natal untuk para anggota direksi dan manajer). Pengadilan yang lebih rendah telah menolak hal ini. BFH tidak menganggap perlu bahwa acara tersebut harus terbuka untuk semua karyawan agar pajak tarif tetap 25% dapat diterapkan. Jika, misalnya, hanya para eksekutif yang diundang ke pesta perusahaan, acara ini masih dapat dikenakan pajak dengan tarif tetap 25%. Pajak tarif tetap yang diizinkan menghasilkan pembebasan kontribusi jaminan sosial. Untuk BFH, acara yang diselenggarakan di tingkat perusahaan dan bersifat sosial cukup untuk dapat mengklaim pajak tarif tetap. Persyaratan bahwa "partisipasi dalam acara perusahaan terbuka untuk semua anggota perusahaan atau bagian dari perusahaan" hanya berlaku dalam hubungannya dengan pemberian tunjangan EUR 110.

### Catatan

Di luar kasus yang diputuskan (eksekutif), muncul pertanyaan apakah jenis acara lain dengan kelompok peserta terbatas (misalnya acara insentif, jamuan makan) juga terpengaruh, yang dapat diasumsikan. Karena potensi dampak yang luas dari keputusan BFH, masih harus dilihat bagaimana otoritas pajak dan mungkin juga organisasi payung sistem jaminan sosial akan bereaksi terhadap keputusan BFH.

Menurut keputusan Pengadilan Sosial Federal baru-baru ini, pengeluaran lebih dari EUR 110 per karyawan untuk perayaan ulang tahun perusahaan akan dikenakan kontribusi jaminan sosial sebagai tunjangan non-tunai jika tidak dibayarkan sekaligus dengan slip gaji, tetapi baru dibayarkan kemudian (Pengadilan Sosial Federal, keputusan 23.04.2024 - B 12 BA 3/22 R).

### Untuk pembayar pajak upah

---

## Manfaat tunjangan pajak untuk karyawan: kontribusi untuk asuransi kecelakaan grup

Asuransi kecelakaan kelompok perusahaan, yang menanggung beberapa karyawan secara bersama-sama untuk kecelakaan kerja dan kecelakaan diri, dapat menjadi pelengkap yang berguna bagi asuransi kecelakaan yang diwajibkan oleh undang-undang. Kontribusi pemberi kerja untuk asuransi kecelakaan kelompok seperti itu memenuhi syarat sebagai upah kena pajak jika karyawan dapat mengajukan klaim asuransi secara langsung kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi membayar manfaat asuransi kepada karyawan sebagai tanggungan.

Dalam hal ini, pemberi kerja dapat memungut iuran untuk asuransi kecelakaan kerja kelompok dengan tarif tetap sebesar 20% hingga 31 Desember 2023 jika bagian dari total premi (tidak termasuk pajak asuransi) yang dapat diatribusikan kepada orang yang diasuransikan tidak melebihi EUR 100 per tahun kalender. Pajak dengan tarif tetap yang diizinkan oleh pemberi kerja menyebabkan pembebasan kontribusi jaminan sosial. Jika

jumlah maksimum EUR 100 yang berlaku hingga 31 Desember 2023 terlampaui, seluruh premi harus dikenakan pemotongan pajak upah individu dan kontribusi jaminan sosial; ini sebelumnya merupakan batas pembebasan pajak.

Growth Opportunities Act menghapuskan ambang batas pajak sebesar EUR 100 mulai 1 Januari 2024, yang berarti bahwa kontribusi yang lebih tinggi untuk asuransi kecelakaan kelompok juga dapat dikenakan pajak oleh pemberi kerja sebagai jumlah sekaligus untuk tahun 2024.

### Catatan

Beberapa tahun yang lalu, Pengadilan Fiskal Federal menetapkan prinsip-prinsip untuk membedakan antara remunerasi tunai dan non-tunai, yang masih berlaku hingga saat ini. Pemberian perlindungan asuransi sebesar kontribusi yang dibayarkan merupakan remunerasi dalam bentuk natura jika karyawan hanya dapat meminta perlindungan asuransi dari pemberi kerja berdasarkan kontrak kerja dan bukan pembayaran tunai.

Dalam hal asuransi kecelakaan, jika pemberi kerja mengambil asuransi kecelakaan untuk melindungi karyawannya dan manfaatnya hanya untuk pemberi kerja ketika kejadian yang diasuransikan terjadi, tidak ada keuntungan finansial dalam jumlah pembayaran kontribusi pemberi kerja. Ketika kejadian yang diasuransikan terjadi, karyawan menerima manfaat dari asuransi kecelakaan. Karyawan menerima upah. Besarnya upah selalu ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan bukan oleh jumlah yang dibayarkan.

Dalam hal asuransi kecelakaan kelompok, bagian kontribusi yang dapat diatribusikan kepada karyawan yang bersangkutan mungkin harus diperkirakan.

## Untuk wajib pajak badan

### Distribusi keuntungan yang tersembunyi: Kontribusi dan sebab akibat yang keliru dari hubungan korporat

Pengalihan aset dari perusahaan ke pemegang saham yang disebabkan oleh hubungan korporasi membutuhkan **niat untuk memberikan kontribusi**. Hal ini mungkin tidak terjadi karena kesalahan di pihak direktur pelaksana pemegang saham. Menurut keputusan Pengadilan Fiskal Federal, faktor yang menentukan dalam hal ini adalah apakah direktur pelaksana pemegang saham tertentu melakukan kesalahan yang sesuai, tetapi bukan apakah direktur pelaksana yang bertindak dengan benar dan teliti juga akan melakukan kesalahan (referensi kasus I R 9/20).

Dalam kasus yang disengketakan, sebuah GmbH menggugat yang modal sahamnya akan disediakan oleh direktur pelaksana pemegang saham tunggal melalui kontribusi kepemilikan saham 100% di GmbH lain, antara lain. Peningkatan modal dilakukan di GmbH yang akan dikontribusikan, yang pada akhirnya menguntungkan direktur pelaksana pemegang saham. Kantor pajak tergugat menganggap hal ini sebagai distribusi keuntungan tersembunyi (vGA) oleh penggugat kepada direktur pelaksana pemegang saham. Penggugat mengklaim bahwa kontribusi kepada direktur pelaksana pemegang saham telah dilakukan secara keliru karena adanya kekeliruan dalam notaris peningkatan modal. Pengadilan yang lebih rendah, yaitu pengadilan pajak, menolak klaim tersebut karena manajer yang bijaksana dan teliti tidak akan melakukan kesalahan seperti yang digambarkan oleh penggugat.

#### Catatan

Pengadilan Fiskal Federal sekarang telah mengklarifikasi bahwa pertanyaan apakah niat untuk memberikan hadiah yang diperlukan untuk asumsi vGA ada, semata-mata bergantung pada pribadi direktur pelaksana pemegang saham tertentu.

## Perundang-undangan

# Undang-Undang Pajak Tahunan Kedua 2024 - Rancangan Undang-Undang

Dalam konsultasi kabinet mengenai rancangan Undang-Undang Pajak Tahunan 2024 pada tanggal 5 Juni 2024, dinyatakan bahwa berbagai tantangan yang belum dapat diatasi dengan langkah-langkah yang terkandung dalam Undang-Undang Pajak Tahunan 2024 diakui. Menurut Kementerian Keuangan Federal. Ini termasuk proyek-proyek seperti mempromosikan anak-anak dan keluarga serta perkembangan lebih lanjut dalam hukum amal. **Undang-Undang Pajak Tahunan Kedua 2024 (JStG 2024 II)** dimaksudkan untuk mengatasi hal ini. Selain keringanan pajak penghasilan yang diperlukan, langkah-langkah individu lainnya akan ditangani yang tidak atau hanya sebagian terkait satu sama lain.

RUU JStG 2024 II pada dasarnya berisi perubahan-perubahan berikut:

### ■ **Pengenalan kewajiban pelaporan untuk pengaturan pajak nasional**

Catatan: Kewajiban pelaporan untuk pengaturan pajak nasional pada awalnya termasuk dalam Growth Opportunities Act, namun dihapus dalam komite mediasi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa akan ada perlawanan terhadap peraturan tersebut dari asosiasi, kamar dagang, dan partai-partai oposisi.

### ■ **Pengalihan kelas pajak III/V ke metode faktor per 01.01.2030**

### ■ **Kenaikan tunjangan dasar bebas pajak yang diintegrasikan ke dalam tarif pajak penghasilan sebesar EUR 300 menjadi EUR 12.084 pada tahun 2025 dan kenaikan EUR 252 menjadi EUR 12.336 mulai tahun 2026**

### ■ **Kenaikan tunjangan anak bebas pajak untuk periode penilaian tahun 2025 sebesar EUR 60 menjadi EUR 6.672 dan dari periode penilaian tahun 2026 sebesar EUR 156 menjadi EUR 6.828**

### ■ **Penyesuaian nilai tolok ukur lain dari tarif pajak penghasilan untuk periode penilaian 2025 dan mulai tahun 2026 (dengan pengecualian nilai tolok ukur yang disebut pajak kekayaan)**

### ■ **Peningkatan batas pengecualian untuk biaya tambahan solidaritas (bukan penghapusan biaya tambahan solidaritas yang telah dibahas) mulai tahun penilaian 2025**

### ■ **Kenaikan tunjangan anak dari 250 euro menjadi 255 euro per bulan mulai Januari 2025**



- **Digitalisasi pemberitahuan kematian**
- **Pembebasan pajak untuk Generation Capital Foundation**
- **Perubahan peraturan** nirlaba: mis. penyesuaian aktivitas yang dapat dikurangkan dari pajak, penghapusan cadangan dan pembentukan modal. Mulai berlaku 01.01.2025

Saat ini (19.07.2024) belum ada informasi mengenai langkah selanjutnya dalam proses legislatif. Namun, JStG 2024 II diharapkan akan diserahkan kepada Kabinet Federal se-segera mungkin.

## Perubahan pada tunjangan orang tua

Kementerian Federal untuk Urusan Keluarga, Warga Lanjut Usia, Wanita dan Pemuda telah menjelaskan peraturan baru untuk tunjangan orang tua untuk kelahiran mulai 1 April 2024 dalam katalog tanya jawab. Perubahan yang paling penting adalah **perubahan ambang batas pendapatan di** mana orang tua tidak lagi berhak atas tunjangan orang tua. Untuk kelahiran **mulai 01.04.2024**, penghasilan kena pajak - baik untuk pasangan maupun orang tua tunggal - telah dikurangi menjadi 200.000 euro.

Untuk **kelahiran mulai 01.04.2025**, batasnya akan disesuaikan lagi ke bawah menjadi 175.000 euro.

### Catatan

Pertanyaannya adalah apakah ini adalah pendekatan yang tepat untuk kebijakan keluarga yang dipertimbangkan dengan baik. Yang pasti, hal ini akan mengurangi jumlah orang tua yang berhak mendapatkan tunjangan orang tua.

Untuk **kelahiran hingga dan termasuk 31 Maret 2024**, batas pendapatan sebelumnya yaitu 300.000 euro untuk pasangan dan 250.000 euro untuk orang tua tunggal akan terus berlaku.

## Peraturan baru untuk usaha kecil

Mulai periode pajak 2024, usaha kecil secara resmi dibebaskan dari kewajiban menyerahkan SPT PPN tahunan. Ini adalah salah satu langkah keringanan pajak yang diperkenalkan dengan **Growth Opportunities Act** pada tahun 2024.

Dengan rancangan **Undang-Undang Pajak Tahunan 2024 yang** saat ini diketahui, peraturan usaha kecil akan diperpanjang dari tahun **2025**. Secara khusus, batas omset EUR 22.000 (tahun sebelumnya) dan EUR 50.000 (tahun kalender saat ini) akan dinaikkan menjadi EUR 25.000 dan EUR 100.000.

## Tagihan elektronik akan datang

Untuk mendorong transformasi digital di Jerman, Undang-Undang Peluang Pertumbuhan memperkenalkan faktur elektronik wajib di sektor B2B domestik yang berlaku mulai 1 Januari 2025. e-faktur diperkenalkan di sektor B2B domestik.

Peralihan ke e-faktur bukan hanya tentang menukar faktur kertas secara elektronik di masa depan. Melainkan, seluruh proses mulai dari penerbitan faktur hingga pembayaran dan pengarsipan faktur serta rekonsiliasi antara otoritas pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran PPN dan pengurangan pajak masukan akan dirancang ulang.

Inovasi ini tidak mempengaruhi konsumen.

### Catatan

Dengan aplikasi-aplikasi pada platform e-faktur DATEV, Anda dapat meningkatkan proses faktur digital Anda ke level selanjutnya dan membuat pertukaran data faktur dengan mitra bisnis Anda menjadi lebih mudah di masa mendatang. Yang menarik: paket dukungan faktur elektronik.

<https://www.datev.de/web/de/aktuelles/e-rechnung-mit-datev/>

## Hukum tentang pencatatan waktu kerja: waktu tidak jelas

Pemerintah Jerman belum dapat memberikan jadwal kapan undang-undang pencatatan jam kerja untuk semua karyawan akan diberlakukan. Sejak keputusan Pengadilan Perburuhan Federal mengenai kewajiban pencatatan jam kerja, perusahaan dan karyawan di Jerman telah menunggu undang-undang yang sesuai.

## Tingkat rata-rata untuk petani turun menjadi 7,8 persen

Mulai tahun 2025, tingkat rata-rata untuk petani adalah 7,8 persen. Ini adalah hasil dari pengarahannya oleh Pemerintah Federal kepada Bundestag (20/11920). Sebelumnya, tingkat suku bunga adalah 9,0 persen.

## Asuransi sosial seniman tetap sebesar 5 persen pada tahun 2025



Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial Federal telah memulai proses partisipasi departemen dan asosiasi untuk Ordonansi Kontribusi Jaminan Sosial Seniman 2025 (KSA-VO 2025). Pada tahun 2025, tingkat kontribusi jaminan sosial seniman tidak akan berubah, yaitu 5,0%.

### Jejak

© 2024 Konten telah disiapkan dengan sangat hati-hati, tidak mengklaim sebagai lengkap dan bukan merupakan pengganti pemeriksaan dan saran dalam kasus-kasus individual.

## Tanggal pajak/jaminan sosial

## Agustus/September 2024

Jenis pajak		Kedewasaan	
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		12.08.2024 <sup>1</sup>	10.09.2024 <sup>1</sup>
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		Tidak berlaku	10.09.2024
Pajak perusahaan, biaya tambahan solidaritas		Tidak berlaku	10.09.2024
Pajak pertambahan nilai		12.08.2024 <sup>2</sup>	10.09.2024 <sup>3</sup>
Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh:	Transfer bank <sup>4</sup>	15.08.2024 <sup>6</sup>	13.09.2024
	Periksa <sup>5</sup>	12.08.2024	10.09.2024
Pajak perdagangan		15.08.2024 <sup>6</sup>	Tidak berlaku
Pajak properti		15.08.2024 <sup>6</sup>	Tidak berlaku
Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh:	Transfer bank <sup>4</sup>	19.08.2024	Tidak berlaku
	Periksa <sup>5</sup>	15.08.2024	Tidak berlaku
Asuransi sosial <sup>7</sup>		28.08.2024	26.09.2024
Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas		Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas yang harus dibayarkan harus dibayarkan ke kantor pajak terkait pada saat yang sama dengan distribusi laba kepada pemegang saham.	

<sup>1</sup> Selama sebulan terakhir.

<sup>2</sup> Untuk bulan terakhir, untuk bulan kedua dari belakang dalam hal perpanjangan permanen, dan untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan dengan perpanjangan permanen.

<sup>3</sup> Untuk bulan sebelumnya, untuk bulan sebelumnya dalam kasus perpanjangan permanen.

<sup>4</sup> SPT PPN dan SPT PPH masa depan umumnya harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya keterlambatan pembayaran yang akan dikenakan jika pembayaran terlambat hingga tiga hari. Transfer bank harus dilakukan tepat waktu sehingga tanggal nilai pada rekening kantor pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

<sup>5</sup> Jika pembayaran dilakukan dengan cek, harap diperhatikan bahwa pembayaran tidak dianggap telah dilakukan hingga tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Otorisasi pendebitan langsung harus diterbitkan sebagai gantinya.

<sup>6</sup> Di negara bagian dan wilayah federal di mana tanggal 15.08.2024 merupakan hari libur nasional (Hari Asumsi), pajak jatuh tempo pada tanggal 16.08.2024.

<sup>7</sup> Iuran jaminan sosial jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir pada bulan berjalan. Prosedur debit langsung disarankan untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu standar untuk mengirimkan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu pada tanggal 26.08.2024/24.09.2024, pukul 00.00 dalam setiap kasus). Keunikan regional mengenai tanggal jatuh tempo mungkin perlu dipertimbangkan. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh kontraktor eksternal, data upah dan gaji harus dikirim ke kontraktor sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku khususnya jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.